

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Bentuk tanggung jawab perusahaan akan isu keberlanjutan adalah dengan berpartisipasi pada kegiatan sosial, lingkungan, dan tata Kelola. Dengan begitu, perusahaan mampu merealisasikan pembangunan berkelanjutan searah dengan konsensus negara-negara G20 atas isu SDGs (Sustainable Development Goals) (Nosratabadi et al., 2019; Van Tulder & Van Zanten, 2018; Yang et al., 2021). Kini pengemban tanggung jawab mengupayakan agar perusahaan bisa menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan. Perusahaan diharapkan dapat mengelola dampak operasi bisnisnya dengan menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, memiliki tata kelola yang baik, dan memiliki tanggung jawab sosial. Ini terutama berlaku untuk perusahaan besar yang menggunakan lebih banyak sumber daya. Perusahaan harus memenuhi harapan para stakeholder agar dapat beroperasi dengan baik (Velte, 2020).

Keberlanjutan merupakan agenda penting pada berbagai tingkatan, baik individu, organisasi, maupun negara. Organisasi sedang berupaya untuk memajukan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2030. Sesuai dengan SDG No. 16, yaitu masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, praktik tata kelola perusahaan yang baik adalah salah satu cara yang digunakan oleh organisasi. Untuk memajukan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan, SDG 16 menjabarkan peran penting yang dimainkan oleh tata kelola dan hukum (Susilowati et al., 2022).

Laporan keberlanjutan (sustainability report) menjawab tuntutan dari stakeholders dan memungkinkan perusahaan menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya dalam melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Laporan keberlanjutan juga mengungkapkan dampak ekonomi dan informasi tentang tata kelola lingkungan, sosial, dan lingkungan, yang memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan dan menerapkan inisiatif keberlanjutan. Meningkatkan kinerja perusahaan, kinerja keuangan, likuiditas saham, penurunan volatilitas, dan biaya modal (ekuitas dan hutang) adalah hasil dari tindakan ESG (Ratajczak & Mikołajewicz, 2021).

Pengungkapan ESG sudah menjadi mandatory report. Praktik prinsip ESG dapat dilihat dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Perhatian utama dari POJK Nomor 51/POJK.03/2017 ini sendiri yaitu untuk melahirkan suatu pembangunan berkelanjutan yang mampu memastikan dan memelihara stabilitas ekonomi dan sistem perekonomian nasional yang mengutamakan keseimbangan antara aspek lingkungan hidup, sosial, dan perekonomian.

Upaya pemaparan data non keuangan dari tindakan ESG dilakukan guna mengembangkan nilai performa Perusahaan. Performa Perusahaan bisa dinilai melalui rasio keuangan seperti profitabilitas, nilai pasar, dan lainnya. Menilai kinerja dari perspektif keuangan melahirkan isu penting saat menilai keberhasilan perusahaan, apakah sesuai dengan misi perusahaan. Model suatu pemaparan dalam perusahaan, tentunya saat ini menjadi salah satu parameter esensial dalam kinerja suatu perusahaan. (Alareeni & Hamdan, 2020).

Pengungkapan dan penerapan ESG pada pengaplikasian investasi saat ini telah mengembangkan ajarannya pada seluruh pelosok negeri. Pada Tahun 2018, RBC melakukan sebuah kajian dan menemukan 72% narasumber yang datang dari Amerika, Kanada, Eropa, dan Asia, yang mana RBC menerapkan aspek ESG dalam determinasi investasi mereka. Untuk memenuhi kebaruan pada system keberlanjutan, Indonesia menerbitkan *Roadmap Sustainable Finance Roadmap* Tahap II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tujuannya untuk memajukan aspek ESG kedalam seluruh kegiatan pembangunan guna menciptakan keberagaman sistem keuangan berkelanjutan yang bersifat menyeluruh (ojk.go.id).

Investor institusi dan individu saat ini sangat mempertimbangkan gagasan faktor ESG (Lee et al., 2022). Prinsip PBB untuk investasi yang bertanggung jawab mendorong investor untuk mempertimbangkan masalah ESG saat mengevaluasi kinerja perusahaan (Numanovich & Abbasxonovich, 2020). Selain itu, sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan, masyarakat, dan keuntungan, atau yang dikenal sebagai konsep *triple buttom line*, menjadikan hal tersebut sebagai perhatian khusus untuk membuat para investor, kreditor, pemerintah dan pihak berwenang lainnya memberikan kontribusi dalam Pembangunan berkelanjutan (Junius et al., 2020). Investasi perusahaan yang terlibat dalam praktik ESG memiliki potensi untuk meningkatkan citra perusahaan dengan meningkatkan tingkat kepercayaan dari berbagai pihak yang memiliki dampak positif (Anggraini & Wahyudi, 2022).

GRI Standads dijadikan sebagai aspek pengukuran Pengungkapan ESG. Sebuah Upaya praktik terbaik yang dikembangkan oleh *Global Reporting*

*Initiative* (GRI) adalah GRI Standards, yang menyusun kerangka kerja untuk pelaporan dampak lingkungan, social, dan tata kelola perusahaan kepada masyarakat melalui standarisasi yang diakui secara global. Dengan melakukan penedekatan pengungkapan ESG, perusahaan dapat menggunakan GRI 300 untuk topik lingkungan dengan 32 indikator pengungkapan, GRI 400 untuk topik social dengan 40 indikator pengungkapan, dan GRI 102 untuk topik tata Kelola dengan 27 indikator pengungkapan. Teknik perhitungan pengungkapan ESG dapat membandingkan jumlah indikator yang dilaporkan perusahaan dengan jumlah indikator yang tidak dilaporkan (Ghazali et al., 2020).

Perusahaan BUMN dalam menjalankan usahanya mendukung pelaksanaan system ESG. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa akan mendukung dan meningkatkan interaksi jaringan sebagai upaya untuk menyelaraskan serta memajukan kinerja ESG dalam pembangunan infrastruktur sebagai usaha memulihkan ekonomi (Winarto & Masitoh, 2022). BUMN berjanji untuk mengembangkan ekonomi di Indonesia dengan mengimplementasikan pedoman dasar *Environmental Social Governance* (ESG).

Hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup menemukan fakta bahwa masih terdapat beberapa perusahaan BUMN yang turun andil dalam kerusakan lingkungan. Berdasarkan data hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup yang diperoleh memperlihatkan bahwa tidak sedikit BUMN yang tidak cukup baik dalam mengelolah lingkungan. Sigit Reliantoro selaku Sekretaris Tim Proper Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setidaknya ekitar 49 perusahaan dari 1.002 telah abai dan melanggar ketentuan

hingga memperburuk lingkungan. ada 11 dari 49 BUMN yang mendapat label hitam atau bisa disebut tidak ramah lingkungan, 5 dari 11 BUMN tersebut adalah anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara (PT PN) IX, Perusahaan tersebut mengelolah gula yang saat ini berlangsung di Jawa Tengah. Sedangkan adapun anak perusahaan yang mengelolah perindustrian kelapa sawit adalah salah satu dari bagian PT PN XIII yang berkedudukan di Kalimantan Timur (kompas.com).

Koalisi Forests & Finance menjumpai bahwa OJK dan tiga bank BUMN utama di Indonesia, Mandiri, BNI, BRI, dan telah memberikan dana untuk kerusakan hutan dan pelanggaran HAM. Mandiri, BNI dan BRI merupakan bank BUMN teratas yang menuntun 33 bank untuk berpartisipasi dalam pembiayaan kejahatan lingkungan. Mereka terus membiayai bisnis dengan rekam jejak perusakan hutan dan perampasan lahan masyarakat lokal, seperti sawit dan perusahaan yang mengelolah kertas.

Terdapat 36 bank di Indonesia terlibat kejahatan lingkungan. Dari 5 tertinggi bank yang paling banyak berkontribusi, 3 diantaranya adalah bank BUMN. Misalnya, Bank Mandiri terus memberikan dana kepada Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), meskipun salah satu anak perusahaan AALI, PT. Lestari Tani Teladan (PT.LTT) di Sulteng, gagal memenuhi syarat minimal 20% untuk pembangunan kebun masyarakat. Selain itu, PT.LTT gagal segera menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Dalam kasus anak perusahaan AALI lainnya PT Agro Nusa Abadi (PT.ANA), yang berada di Sulteng, juga memiliki nilai LST terendah. Ini karena PT.ANA tidak mempunyai legalitas usaha perkebunan atau penguasaan lahan. PT.ANA berlokasi berada di dekat

bisnis perkebunan milik pengusaha lain dan wilayah yang masih di kelola oleh masyarakat sekitar.

Pembiayaan BNI kepada Korindo juga mengidentifikasi kejahatan perbankan lainnya. PT. Papua Agro Lestari (PT.PAL), anak perusahaan Grup Korindo, sebelumnya dilaporkan kepada BNI melalui sistem whistle blowing atas dugaan korupsi dalam perolehan izin konsesi PT.PAL. Setelah penyelidikan independen, sejumlah pelanggaran sosial dan lingkungan ditemukan di seluruh konsesi Korindo di Papua dan Maluku Utara. Sertifikasi FSC Korindo kemudian dicabut. Izin pemanfaatan hutan lebih dari 65.000 ha, PT. PAL (32.348 ha), PT. Tunas Sawa Erma (19.001 ha), dan PT. Berkat Cipta Abadi II (14.435 ha) dicabut oleh KLHK pada 5 Januari 2022. Namun, hal tersebut cukup mendorong BNI untuk segera menghentikan pembiayaan BNI pada Korindo. (TukIndonesia, 2022).

BRI terus memberikan dukungan finansial kepada perusahaan besar yang menghasilkan minyak sawit Sinar Mas, PT. Kresna Duta Agrindo merupakan anak Perusahaan yang terlibat dalam berbagai kasus pencemaran air dan udara, sengketa tanah, perampasan lahan, penembakan polisi, represi, dan intimidasi terhadap petani di Jambi.

Tahun 2024 ini terjadi kasus korupsi pada PT. Timah yang menimbulkan kerugian lingkungan sebesar Rp. 271 Triliun. Pakar forensik kehutanan menjelaskan dalam penghitungan kerugian ekologi atau lingkungan itu, pihaknya melakukan verifikasi di lapangan serta pengamatan dengan citra satelit dari tahun 2015 sampai 2022.

Hasil verifikasi tersebut, pihaknya melakukan penghitungan kerugian ekologi yang ditimbulkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan. Dengan membaginya kerugian lingkungan di kawasan hutan dan luar kawasan hutan. Total kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan, yakni biaya kerugian lingkungan (ekologi) Rp157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp60,27 miliar dan biaya pemulihan lingkungan Rp5,26 miliar sehingga totalnya Rp223,36 triliun. Sedangkan kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan (APL), yakni biaya kerugian lingkungan Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan Rp6,62 miliar sehingga totalnya Rp47,70 triliun. Jika semua digabung kawasan hutan dan luar kawasan hutan, total kerugian akibat kerusakan yang juga harus ditanggung negara adalah Rp271,06 triliun

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Pedoman Asesmen Penerapan Faktor *Environmental*, *Social*, dan *Governance* atau ESG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut pedoman asesmen ESG menjadi dasar pengawasan BPKP dalam kegiatan asesmen di triwulan II tahun 2023. Pedoman ini bertujuan untuk mendukung peningkatan *value* BUMN dengan mengintegrasikan ESG dan juga mendukung pencapaian target *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Pedoman tersebut berisikan indikator-indikator lingkungan, sosial, tata kelola, dan ekonomi untuk memotret kualitas penerapan ESG di 33 BUMN (bpkp, 2023).

Diharapkan bahwa kesadaran masyarakat akan investasi keberlanjutan akan terus meningkat sebagai akibat dari pengungkapan ESG dan peraturan badan otoritas. Dari perspektif perusahaan, pengungkapan informasi ESG pasti dapat menarik investor yang memperhatikan aspek keberlanjutan untuk menanamkan dana ke dalam perusahaan sebagai tujuan investasi. Pengungkapan ESG juga dapat meningkatkan citra perusahaan (identitas perusahaan). Peningkatan citra dan reputasi perusahaan tentu memiliki peluang untuk menarik konsumen, yang berdampak pada loyalitas perusahaan. Namun, persoalan muncul terkait sejauh mana Pengungkapan ESG tersebut terealisasi dan memiliki dampak yang signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Tantangan seperti kurangnya transparansi, kebijakan internal yang belum mendukung, dan kendala operasional dalam mengimplementasikan praktik ESG dapat menjadi hambatan (Ningwati et al., 2022).

Kinerja Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali menjadi sorotan karena menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keberlanjutan operasionalnya. Beberapa permasalahan yang muncul melibatkan manajemen risiko yang belum optimal, kendala dalam efisiensi operasional, serta tantangan terkait transparansi dan akuntabilitas. Dampak dari COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 menjadi permasalahan bagi banyak perusahaan. Pembatasan sosial berskala besar, penurunan aktivitas ekonomi, dan gangguan rantai pasokan global menyebabkan banyak BUMN mengalami penurunan pendapatan dan keuntungan. Selain itu, perusahaan juga menghadapi peningkatan biaya operasional akibat protokol kesehatan yang ketat dan kebutuhan untuk

beradaptasi dengan model bisnis baru yang lebih digital. Akibatnya, banyak BUMN harus melakukan restrukturisasi dan menunda proyek-proyek besar, yang pada akhirnya mengurangi kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional selama periode tersebut. Risiko-risiko ini dapat berasal dari kebijakan internal, perubahan kondisi pasar, hingga perubahan regulasi yang mempengaruhi kegiatan operasional BUMN (Margaret, 2023).

Salah satu langkah yang mungkin untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui penelitian yang berfokus pada pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Perusahaan BUMN. Dalam konteks ini, parameter kinerja perusahaan di proksi kan dengan *Return on Assets* (ROA). ROA adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. ROA memberikan pandangan yang kuat tentang sejauh mana perusahaan dapat memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba yang menguntungkan (Permata et al., 2022).

Penelitian mendalam terhadap bagaimana penerapan prinsip GCG dapat memengaruhi variabel kinerja ini dapat memberikan wawasan strategis yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan laba perusahaan BUMN (Safriani & Utomo, 2020).

Penelitian ini masih sangat jarang dilakukan. Beberapa penelitian masih melakukan pengujian pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Kinerja Perusahaan maupun pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini ingin menguji peran pengungkapan ESG dalam memediasi dewan direksi dan komite audit terhadap kinerja BUMN.

Dewan Direksi di proksikan dengan ukuran dewan direksi dan jumlah rapat dewan direksi karena ukuran dan jumlah rapat yang tepat adalah penting untuk memastikan efisiensi pengambilan keputusan, representasi yang seimbang dari keahlian dan perspektif, kontrol biaya yang efektif, fokus yang lebih besar dari setiap anggota, fleksibilitas dalam menanggapi perubahan bisnis, dan jadwal rapat yang memungkinkan partisipasi penuh dan diskusi mendalam tentang isu-isu strategis. Dengan mengatur dewan direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, perusahaan dapat memastikan bahwa badan pengawasnya dapat beroperasi secara efektif dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan jangka panjang perusahaan (Mei Rinta, 2021). Dewan direksi sebagai pemimpin strategis perusahaan, memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan visi dan strategi jangka panjang. Melibatkan Dewan Direksi dalam Pengungkapan ESG memastikan bahwa komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan tercermin dalam strategi berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap nilai jangka Panjang (Lestari & Mutmainah, 2020).

Komite audit di proksikan dengan ukuran komite audit yang disesuaikan memastikan bahwa semua anggota dapat berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi yang signifikan, independensi komite audit dari manajemen perusahaan dan kepentingan lainnya adalah prasyarat untuk memastikan penilaian objektif atas praktik keuangan perusahaan, jumlah rapat untuk pemantauan terus-menerus terhadap masalah keuangan dan pelaporan, keahlian yang memadai dalam komite audit memungkinkan untuk pemahaman yang lebih baik tentang risiko keuangan dan perlunya langkah-langkah korektif

yang tepat (Aisyah et al., 2019). Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, perusahaan dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengelola risiko keuangan, memenuhi standar kepatuhan yang ketat, dan membangun kepercayaan investor serta pemangku kepentingan lainnya. Komite Audit dengan fokusnya pada transparansi dan keandalan informasi keuangan, memainkan peran penting dalam memverifikasi integritas informasi ESG. Keterlibatan mereka membantu memastikan bahwa metode pengukuran kinerja ESG sesuai dengan standar yang diakui, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap informasi yang disajikan (Masak & Noviyanti, 2019).

Penelitian ini dikembangkan untuk menguji pengaruh karakteristik Dewan Direksi dan Komite Audit terhadap Pengungkapan ESG dan Kinerja Perusahaan dengan kondisi, waktu dan objek penelitian yang berbeda. Obyek dari penelitian ini yaitu perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengungkapkan *sustainability report* pada tahun 2018-2022. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yang berupa data sekunder yang didapat dari BEI serta dari situs web resmi perusahaan. Penelitian ini menggunakan Perusahaan BUMN yang mempublikasikan *sustainability report* karena perusahaan yang *go public* harus mengungkapkan transparansinya dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola terhadap Pengungkapan ESG. Penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konklusif.

Penelitian ini mengembangkan model yang didasarkan pada penelitian Jimantoro, Maria, dan Rachmawati (2023) yang diharapkan mampu memberikan

manfaat akademis, yaitu memperbanyak penelitian tentang penerapan ESG juga memperkuat hasil dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi perusahaan karena *sustainability report* mengandung informasi yang baik bagi perusahaan maupun *stakeholders*.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka penulis ingin menguji pengaruh GCG terhadap Pengungkapan ESG dan Kinerja Perusahaan dengan judul **“Peran Pengungkapan ESG Dalam Memediasi Pengaruh Dewan Direksi Dan Komite Audit Terhadap Kinerja BUMN”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
2. Apakah Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
3. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
4. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
5. Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG?
6. Apakah Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?

7. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN?
8. Apakah Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN?
9. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN?
10. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN?
11. Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN?
12. Apakah Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN?
13. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
14. Apakah Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
15. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
16. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN?
17. Apakah Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG perusahaan BUMN?
18. Apakah Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG perusahaan BUMN?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berlandaskan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG dalam perusahaan BUMN.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Jumlah Rapat Dewan Direksi terhadap Pengungkapan ESG dalam perusahaan BUMN.
3. Untuk menguji dan membuktikan Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG.
4. Untuk menguji dan membuktikan Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN.
5. Untuk menguji dan membuktikan Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN.
6. Untuk menguji dan membuktikan Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN.
7. Untuk menguji dan membuktikan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN.
8. Untuk menguji dan membuktikan Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN.
9. Untuk menguji dan membuktikan Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN.
10. Untuk menguji dan membuktikan Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN.

11. Untuk menguji dan membuktikan Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN.
12. Untuk menguji dan membuktikan Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan BUMN
13. Untuk menguji dan membuktikan Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN.
14. Untuk menguji dan membuktikan Jumlah Rapat Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN.
15. Untuk menguji dan membuktikan Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN
16. Untuk menguji dan membuktikan Independensi Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN.
17. Untuk menguji dan membuktikan Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan pada perusahaan BUMN.
18. Untuk menguji dan membuktikan Keahlian Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan melalui Pengungkapan ESG pada perusahaan BUMN.

#### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat menghantarkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan ESG, Kinerja Perusahaan yang dapat digunakan untuk penelitian para akademisi dan praktisi di bidang akuntansi di masa yang akan datang.
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kontribusi dalam pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan praktik pengungkapan sosial dalam laporan keberlanjutan perusahaan.
3. Bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi manajemen sumber daya manusia serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain.